

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS IMPOR “MONZA”

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan sebagai istilah yang berasal dari hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit* dalam bahasa belanda, dan kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan termasuk Bahasa Indonesia dimana para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Salah satunya pengertian tindak pidana menurut Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”¹²

Kata *strabaar feit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari pemisahan tiga kata tersebut secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Pada kaitanya dengan istilah *strabaar feit* secara utuh, bahwa *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. kata *feit* digunakan dengan 4 (empat) istilah yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan arti “perbuatan” dikarenakan kata pelanggaran

¹² Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. Bina Aksara. Hlm 54

telah lazim digunakan dalam pembendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrending* sebagai lawan dari istilah *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan dari 2 (dua) sudut pandang yaitu teoritis dan Undang-Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli sedangkan maksud Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal serta perundang-undangan yang ada.

Unsur tindak pidana dalam sudut pandang teoritis salah satunya adalah menurut Prof. Moeljatno, SH, Unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan;
- b. yang dilarang (oleh aturan Hukum);
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁴

Serta menurut Simons, unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. perbuatan manusia (positis atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau mebiarkan)
- b. diancam deengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. melawan hukum (*onerechtmaticig*)
- d. dilakukan dengan kesalah (*met schuld in verband sttand*)
- e. oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatoaar person*)¹⁵

¹³ Adami Chazawi., 2001, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. Hlm 69

¹⁴ Moeljatno., M.A. Op.Cit., Hlm. 54

Unsur Tindak pidana dalam Undang-undang setidaknya dibedakan menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya , akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁶ Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*)
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud pada pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. macam-macam maksud atau *oorgmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*;
- e. perasaan takut atau *vress*.¹⁷

15 Admin. *Unsur-unsur tindak pidana*. <https://www.suduthukm.com>. Diakses pada tanggal 23 oktober 2018.

16 Adami Chazawi., 2001, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. Hlm 83

17 Admin. *Unsur-unsur tindak pidana*. <https://www.suduthukm.com>. Diakses pada tanggal 23 oktober 2018.

B. Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Penyelundupan

Menurut Adam Smith dalam terjemahannya “penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warganegara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu”.¹⁸ Dengan demikian penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan dengan suatu pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang barang terlarang. Tindak pidana penyelundupan dalam ekspor dan impor melakukan kegiatan mengantarpulaukan barang dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁹ Dalam penulisan ini pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia ke antar negara, karena pengertian penyelundupan hanya digunakan khusus dalam kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pengertian lain dalam konteks penyelundupan manusia dan Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia melainkan dengan sebutan imigran gelap.²⁰

18 Yudi Wibowo Sukinto., 2015, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia : Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 39

19 Soufnir Chibro., 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 5

20 Ibid.

Pengertian penyelundupan juga terdapat di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967, pada pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: “Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indoneisa (impor)”.

Maksud penyelundupan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 102 dan 102A yang berbunyi:

Pasal 102

Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

Pasal 102A

Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3); d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- d. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

Penerapan sanksi pada tindak pidana penyelundupan juga terdapat pada pasal 102, 102A, 102B, 102C dan 102D. Sanksi pidana penyelundupan dalam pasal-pasal tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara serta merusak stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu undang-undang tentang kepabeanan mencerminkan kesungguhan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan.

2. Bentuk dan Jenis Penyelundupan

Secara umum penyelundupan terdiri dari dua macam yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik ditentukan dalam pasal 26b (1) Ordonansi Bea, yang berbunyi “Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ardonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya, atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan

larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah”. Maksud dari pasal 3 ayat (2) Ordonansi bea yang ditunjuk pada pasal 26b yaitu “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan semufakat Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau perairan atau daerah-daerah, dimana barang-barang yang ditunjuknya dilarang diangkut dan/atau berada dalam sebuah bangunan atau dipekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai bea dan cukai atau dari jawatan-jawatan lain yang ditunjuknya”

Sedangkan penyelundupan administratif adalah setiap kegiatan yang memberikan keterangan tidak benar pada dokumen terkait dengan jumlah, jenis atau harga barang yang ada didalamnya. Penyelundupan administratif diatur pada pasal 25 ayat (2) c Ordonansi bea, yang berbunyi “Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman kedalam atau keluar daerah pabean atau pembokaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain”. Dengan demikian pada dua jenis penyelundupan dalam penyelundupan fisik tidak mempergunakan dokumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif dikategorikan jika barang-barang tersebut masih dalam wilayah

daerah pabean dan adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis di dalam dokumen.²¹

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam pengertiannya merupakan sebuah tindak kegiatan dalam menyasikan hubungan nilai-nilai yang di rumuskan kedalam kaidah yang kokoh kemudian diselaraskan kepada sikap tindak rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²² Dibutuhkannya kekuatan fisik dalam penegakan hukum untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut agar menjadi kenyataan dan tersalurkan, berdasarkan wewenang yang sah *sanction* dimana merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, dalam hal ini dimaksud adalah suatu ancaman tidak akan didapat legitimasi bila tidak ada faedah-faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. *Internal values* merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.²³

21 Soufnir Chibro., Op.Cit., Hlm 7

22 Soerjono soekanto., 2005. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. Hlm. 5

Penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan nilai perilaku nyata manusia. pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.²⁴ Peranan hukum dalam pembangunan masyarakat yang baik ada 2 (dua) konsep hukum yang perlu diketahui antara lain yaitu:

- 1) *Law as a tool of social control*, dalam arti hukum berperan sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas masyarakat atau dengan kata lain berperan untuk mempertahankan apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat.²⁵
- 2) *Law as tool of social engineering*, hukum berperan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat seperti yang dinyatakan oleh Mochtar Kusuma Atmadja, sebagai sarana pembaruan masyarakat hukum bertugas sebagai penyalur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki dalam pembangunan masyarakat yang baik.²⁶

Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat yang tidak secara ketat diatur

23 Siswantoro Sunarso., 2004. *Penegakan Hukum Psikotrapika*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. Hlm. 89

24 Siswantoro Sunarso., Op.Cit., Hlm 71

25 Ediwarman., 2014. *Penegakan Hukum Pidana dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta. Genta Publishing. Hlm 34

26 Ibid.

oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁷ Penegakan hukum yang juga memiliki hubungan pada politik kriminal dan politik sosial merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Politik kriminal pada akhirnya bertujuan dalam perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁸

Tujuan dilakukannya penegakan hukum yaitu untuk mencapai rasa keadilan dan melindungi nilai-nilai sosial serta nilai-nilai hukum dalam masyarakat agar selalu mengalir bersama dalam satu tujuan. Dalam penegakan hukum haruslah memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan pancasila, sehubungan dengan ini maka penegakan hukum bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pemberantasan terhadap tindakan penegakan hukum itu sendiri.²⁹

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Tingkat keseriusan dalam penegakan hukum ditandai oleh situasi pelaksanaan hukum serta upaya penegakan hukum yang sebenarnya juga

27 Soerjono soekanto., Op.Cit., Hlm. 7

28 Ibid.

29 Siswanto Sunarso., Op.Cit., Hlm 72

memiliki faktor-faktor sebagai pendorong yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum, namun dalam hal ini penegakan hukum bukanlah hanya sekedar menjalankan perundang-undangan, meskipun pada kenyataannya di negara Republik Indonesia cenderung demikian. Memiliki kecendrungan dimana mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim, sehingga akan memungkinkan mengganggu kedamaian di dalam kehidupan masyarakat, maka pendapat-pendapat yang terbilang sempit tersebut memiliki kelemahan. Oleh karena itu penegakan hukum dapat dipengaruhi atas adanya faktor-faktor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukum itu Sendiri (*The Legal Factor it Self*)

Suatu peraturan hukum yang baik akan memungkinkan penegakannya. Pada umumnya peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Hans Kelsen secara yuridis apabila peraturan hukum penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, kemudian menurut W.Zevenbergen suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditunjukkan, pada filosofis apabila peraturan tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.³⁰

30 Ediwarman., 2014, Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi. Yogyskarta. Genta Publishing. Hlm 7

Dalam tiga hal ini pada undang-undang dimana pembentukan undang-undang bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, sehingga akan mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasari berpengaruhnya penegakan hukum.³¹ Pada undang-undang terdapat beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif dan agar mencapai tujuannya hingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:³²

- a. Undang-undang tidak berlaku surut yaitu undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum yaitu terhadap peristiwa khusus wajib digunakannya undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum yang juga mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakang, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Yaitu undang-undang lain yang lebih dahulu

31 Adami Chazawi., 2016, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. Hlm 15

32 Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, Hlm 12-13

berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu maka tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, namun makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.

- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan materil dan spirituil bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaruan inovasi dalam hal ini Dimaksudkan supaya pembuatan undang-undang tidak sewenang-wenang ataupun undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati. Maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu yaitu keterbukaan didalam proses pembuatan undang-undang dan pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu dengan cara penguasa setempat mengundang mereka yang berminat menghadiri untuk membicarakan peraturan tertentu yang akan dibuat, kemudian pada suatu departemen tertentu dimana mengundang organisasi tertentu untuk memberikan saran dan masukan bagi undang-undang yang sedang disusun, dan juga pada acara dengar pendapat di dewan perwakilan rakyat atau pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang biasanya terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.³³

2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Factor*)

Peran penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengacara, notaris, dan pengadilan.

³³ Ibid.

Dimana mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum pada masyarakat. Pada tingkat aparat penegak hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegak hukum secara materil/substansial. Penegakan hukum menjadi kewajiban kolektif pada semua komponen bangsa. Dalam hal ini penegak hukum ditegakkan oleh golongan-golongan yaitu:³⁴

- 1) Aparatur negara seperti polisi, hakim, dan jaksa dimana dalam dunia hukum disebut sebagai *The Three Musketers* yang mempunyai fungsi kinerja penegakan hukum yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada tiga aparatur negara tersebut yakni polisi yang menjadi pengatur dan pelaksana penegak hukum didalam ruang lingkup masyarakat, kemudian pada hakim sebagai pemutusan hukum dengan adil dan jaksa yang memiliki institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.³⁵
- 2) Advokasi dan mediasi terdapat pada pengacara dimana ditujukan untuk masyarakat, baik yang bekerja secara individual maupun yang tergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum. Dengan adanya hal tersebut menjadi penuntun bagi masyarakat yang awam hukum, agar dalam tujuannya pada proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan hak dan kewajiban. Sehingga pada hakikatnya

³⁴ Ilhami Bisri., 2004, *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm 128-129

³⁵ Ibid.

putusan hakim akan mengarah pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.³⁶

- 3) Para eksekutif hingga pegawai pemerintahan diberbagai lahan profesi pengabdian dimana memiliki fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
- 4) Masyarakat dengan menggunakan jasa hukum, secara tidak langsung menjadi masyarakat pencari keadilan dan menjunjung tinggi supremasi hukum.³⁷

Secara sosiologis, maka pada setiap golongan tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Hal yang paling utama dalam kemasyarakatan yaitu kedudukan sosial yang merupakan posisi tertentu di dalam strukturnya. Adanya golongan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu dimana hak dan kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karenanya, seseorang yang mempunyai kedudukan atau golongan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dalam golongan tersebut dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:³⁸

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

36 Ibid.

37 Ibid.

38 Soerjono Soekanto., Op.Cit., Hlm 20

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, maka dari itu mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikianlah tidak dipungkiri bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan jugalah bisa menimbulkan konflik.³⁹ Dibutuhkannya performa dan kinerja aparat penegak hukum menjadi salah satu hal yang penting dengan dilandasi oleh akuntabilitas kinerja serta sikap transparansi sehingga akan dapat terlaksanakannya penegakan hukum yang baik dan benar.⁴⁰ Dalam upaya ikut meningkatkan kualitas penegakan hukum sekurang-kurangnya dapat ikut berperan aktif dalam menanggulangi 4 masalah, yaitu:⁴¹

1. Masalah kualitas SDM calon Penegak hukum;
2. Masalah kualitas penegak hukum “*in Abstracto*” (proses pembuatan produk perundang-undangan);
3. Masalah kualitas penegakan hukum “*in concreto*”; dan
4. Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat).⁴²

Sikap penegak hukum di ukur dari seberapa jauh kemampuan aparat penegak hukum dapat merespon laporan masyarakat terhadap kejahatan. Kemampuan memberikan informasi yang mudah dan transparan akan

39 Ibid.

40 Siswantoro Sunarso., Op.Cit., Hlm 148

41 Dr.Brada Nawawi Arief., 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Prenada Media Group. Hlm 148

42 Ibid.

memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat.⁴³

Aparatur penegak hukum harus menaati norma-norma hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan, dan norma kejujuran. Ditujukannya menaati norma-norma tersebut agar dalam penegakan hukum tidak dijumpai orang yang tidak bersalah bisa dihukum, sehingga terciptanya keadilan hukum yang diharapkan.

3. Faktor Sarana (*Means Factor*)

Jika tidak ada sarana dan fasilitas terhadap penegakan hukum maka tidak mungkin berjalan lancar dengan semestinya sarana atau fasilitas antara lain mencakup *skill* atau tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Jika hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum sesuai dengan tujuan dan apa yang ingin dicapai. Dalam penegakan hukum dibutuhkannya sarana atau fasilitas agar mempermudah penegakan hukum tersebut. Banyak dampak yang akan diakibatkan jika belum terpenuhinya sarana atau fasilitas maka akan mempersulit untuk menjalankan penegakan hukum secara optimal sebagai contoh, proses pemeriksaan perkara dipengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi di mahkamah agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena jumlah hakim yang tidak sebanding

43 Siswanto Sunarso., Op.Cit., Hlm 99

dengan jumlah perkara yang harus di periksa dan diputuskan serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peran peradilan yang baik. Demikian pula pihak kepolisian, kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi kriminalitas dalam masyarakat.⁴⁴

Ketiadaan peralatan moderen mengakibatkan banyak kejahatan dalam masyarakat yang belum terungkap. Sebagai contoh dalam permpokan bank dimana untuk membuktikan secara pasti pelaku kejahatan oleh pihak kepolisian, karena tidak mempunyai peralatan yang cukup terpaksa dibawa kepusat (Jakarta) terkhusus pada daerah kecil sehingga akan semakin memperlambat dalam penegakan hukum. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyatukan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:⁴⁵

- a) Yang tidak ada → di adakan;
- b) Yang rusak atau salah → di perbaiki atau di betulkan;
- c) Yang kurang → di tambah;
- d) Yang macet → di lancarkan;
- e) Yang mundur atau merosot → dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat (*Community Factor*)

44 Dr Ediwarman., Op.Cit., Hlm 12

45 Dr. Soerjono Soekanto., Op.Cit., Hlm 44

Adanya masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum hal ini dapat dilihat dalam ketentuan umum peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Tentang Tatacara Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, di dalam pasal 1 didefinisikan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaati norma-norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dapat diartikan bahwa di dalam bagian tersebut penegakan hukum berasal dari masyarakat dan pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum sangatlah mempengaruhi kepatuhan hukumnya sehingga akan terwujudnya kedamaian dalam masyarakat.⁴⁶

Pentingnya kesadaran hukum pada masyarakat akan berdampak baik pula penegakan hukumnya, maka jika sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum pada masyarakat maka akan berdampak kesulitan untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang dimaksud kesadaran hukum pada masyarakat bahwa pengetahuan hukum haruslah ditanamkan kepada masyarakat secara merata, karena kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa itu hukum. Maka pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni agama, ekonomi, politik, dan lain-lain.⁴⁷

46 Ediwarman., Op.Cit., Hlm 13

47 Ibid.

Kecenderungan masyarakat yang tidak paham akan hukum berdampak pada mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan cerminan dari hukum sebagai terstruktur maupun proses. Sebagai contoh dari kalangan penegak hukum yaitu polisi dimana masyarakat mempunyai pemikiran bahwa hanya polisilah yang serta merta dapat menanggulangi penegakan hukum tanpa memperhitungkan berpengalaman atau tidaknya polisi tersebut. Masyarakat yang berhadapan dengan polisi kebanyakan tidak sempat memikirkan taraf pendidikan dan pengalaman yang sudah dialami oleh polisi tersebut. Oleh sebab itulah pentingnya pengetahuan hukum diterapkan oleh seluruh masyarakat agar masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka dan mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Beberapa kewajiban dan hak warga masyarakat dalam upaya penegakan hukum : ⁴⁸

a) Upaya pencegahan

masyarakat sebagai suatu objek hukum mempunyai kewajiban menerapkan metode pemberian informasi kepada penegak hukum. Melaporkan suatu kejahatan kepada penegak hukum adalah merupakan hal yang esensial. Secara logika, masyarakat lebih mengetahui terlebih dahulu dibandingkan dengan petugas maka hal ini sesuai dengan kerja

48 Siswanto Sunarso., Op.Cit., Hlm 100-101

dilingkungan aparat penegak hukum, dimana kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh petugas sering tidak membuahkan hasil yang optimal, karena petugas penegak hukum tidak menguasai betul jaringan-jaringan kejahatan serta modus operandi kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dipandang sangatlah efektif, karena anggota masyarakat lebih mengetahui tentang alur peredaran serta jaringan-jaringan kejahatan.⁴⁹

b) Jaminan keamanan dan perlindungan hukum

Bentuk-bentuk jaminan perlindungan dan keamanan secara normatif belum diatur secara jelas oleh undang-undang khususnya kepada masyarakat pelapor kejahatan namun demikian pada kenyataannya, perlindungan itu sendiri sering dilakukan oleh petugas penegak hukum, tetapi hanya bersifat temporer.⁵⁰

Tingkat efektifitas peran serta masyarakat sangatlah berpengaruh oleh tingkat etika profesi penegak hukum yang memiliki kemampuan berkomunikasi sosial, serta membentuk jaringan informasi antar penegak hukum dan masyarakat. Etika profesi penegak hukum yaitu menjamin keadilan hukum, kepastian hukum, serta manfaat hukum itu sendiri. Terkadang penegak hukum dalam menghadapi struktur sosial masyarakat tertentu, tidak secara langsung melakukan komunikasi karena adanya kendala-kendala tertentu.⁵¹

49 Ibid.

50 Ibid.

51 Ahmad suhendra. *Etika Pengak Hukum*. <https://www.dakwatuna.com>. Diakses pada tanggal 23 oktober 2018.

5. Faktor Budaya (*Cultural Factor*)

Kebudayaan pada dasarnya bersatu padu dengan masyarakat dimana mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh sebab itu kebudayaan di Indonesia merupakan dasar untuk mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat, namun disamping itu berlaku pula hukum tertulis (undang-undang) yang dibentuk oleh pemerintah. Disamping itu kebudayaan mempengaruhi perilaku para penegak hukum itu sendiri.⁵²

Hubungan kebudayaan dengan penegak hukum dapat berjalan dengan baik jika mempunyai aspek moral sehingga akan menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Sebagai contoh jika moral dalam ruang lingkup budaya, penegakan hukum yang kurang baik misalnya di pengadilan berupa pemberian amplop di dalam memutuskan suatu perkara pidana atau perdata. Budaya ini sudah merupakan suatu penyakit kronis yang susah untuk diperbaiki. Meskipun tidak semua perkara dilakukan seperti hal tersebut tetapi budaya ini sudah dilakukan sejak lama. Maka dari itu, suatu tindakan supaya moralitas benar-benar rasional maka tindakan moral harus mampu memenuhi tujuan untuk menuju kebaikan tertinggi, begitu pula dalam kebudayaan dalam masyarakat.⁵³

52 Ediwarman., Op.Cit., Hlm 14

53 Ibid.

D. Pakaian Bekas “MONZA”

1. Pengertian Pakaian

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok selain sandang pangan, serta menjadikan pakaian sebagai kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. pakaian merupakan sebagai alat pelindung dan penutup. Dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pemikiran manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol, status, jabatan atau kedudukan bagi seseorang yang memakainya.⁵⁴ Pakaian merupakan alat penutup yang selalu melekat di tubuh, yang akan memberikan kenyamanan, keamanan dan kepantasan bagi penggunaanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pada pakaian akan terus meningkat seiring berkembangnya populasi manusia.

2. Pakaian Bekas di Sumatera Utara

Masyarakat Sumatera Utara sudah tidak asing mendengar pakaian bekas atau kerap disebut dengan “monza”. Sebagian masyarakat Sumatera Utara memakai barang tersebut, hal ini disebabkan karena harga yang murah serta kualitas yang terbilang baik. Pada era tahun 1980 hingga sampai tahun 2010 Sumatera utara terutama Kota Medan adalah pusat perdagangan Monza yang di datangkan dari Pelabuhan Belawan. Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Sehingga

⁵⁴ Wikipedia. *Pengertian Pakaian*. <https://id.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 23 mei 2018.

masuknya barang bekas dari Pelabuhan Belawan dilarang dan Monzapun dengan sendirinya sudah mulai berkurang serta para penjual mulai tutup.⁵⁵

Para pelaku impor pakaian bekas tidak berhenti begitu saja, melainkan mereka mengalihkan usaha pakaian bekas impor ke Kota Tanjung Balai. Barang tersebut di datangkan dari Negara Malaysia. Lewat aksi penyelundupan inilah bal pres pakaian bekas setiap harinya memasuki pelabuhan tikus yang banyak terdapat disepanjang aliran Sungai Asahan Kota Tanjung Balai.⁵⁶ Ketua Harian Perhimpunan Pedagang Pakaian Bekas Seluruh Indonesia (P3BSI), Nathan S, mengakui pakaian bekas masuk secara ilegal melalui pelabuhan tikus karena pemerintah tidak memberikan akses resmi dalam mengimpor pakaian bekas.⁵⁷

E. Impor

1. Pengertian Impor

Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pada pasal 1 ayat 13 bahwa Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang tentang

⁵⁵ Wisnu AJ. *Impor Pakaian Bekas Dalam Problema Ekonomi*.
<https://www.kompasiana.com>. Diakses pada tanggal 23 mei 2018.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Medan Bisnis Daily. *Perpres larang Impor Pakain Bekas Kontraproduktif*.
<https://www.medanbisnisdaily.com>. Diakses pada tanggal 23 mei 2018.

kepabeanan. Kegiatan import dilakukan oleh para pelaku usaha yang disebut importir dalam melakukan kegiatannya menyangkut perusahaan atau perorangan.

Impor juga dimaksudkan perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli di luar negeri, seseorang pedagang yang melakukan impor disebut dengan importir. Para importir umumnya terdiri atas:⁵⁸

a. Pengusaha Impor

Pengusaha impor atau lazim disebut dengan *Impor Merchant* adalah badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk Tanda Pengenal Pengakuan Importir atau TAPPI.

b. *Approved Impoter*

Dimaksud adalah pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah dan departemen perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu dalam tujuan tertentu pula yang dipandang hal tersebut perlu oleh pemerintah.

c. Importir Terbatas

Importir terbatas dilakukan untuk memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU-PMA/PMDN, pemerintah telah memberikan izin khususnya pada perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) biasanya dilakukan untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (bukan untuk diperdagangkan).

d. Importir Umum

Importir umum adalah perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka barang perdagangan dimana dapat memperoleh kedudukan sebagai

58 Adrian Sutedi., 2014, *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta. Niaga Swadaya. Hlm 18

importir umum atau lazim disebut *General Importir*. Perusahaan yang biasa memperoleh status sebagai importir umum, kebanyakan hanya persero niaga atau perusahaan dagang negara.

e. *Agent Importers*

Agent Importers dimaksud adalah perusahaan asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilan atau menunjuk suatu agent tunggal yang akan mengimpor hasil produknya ke Indonesia.

f. *Buying Agent*

Buying Agent adalah pihak yang bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembeli di luar negeri.

Dilakukannya kegiatan Impor karena setiap negara memiliki keunggulan dan kekurangan serta komoditas yang dihasilkan suatu negara mungkin juga belum dapat dipakai langsung karena berupa bahan mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan seterusnya yaitu bahan mentah tersebut mungkin selanjutnya dibutuhkan negara lain sebagai bahan baku pabriknya.

2. Prosedur Kegiatan dan Ketentuan Impor di Indonesia

Komoditi Impor di Indonesia digolongkan kedalam komoditi yang boleh diimpor dan komoditi yang tidak boleh di impor, kebijakan untuk menetapkan jenis-jenis komoditi yang tidak boleh diimpor atau dibatasi impornya didasarkan pada kepentingan dalam negeri disamping menghemat pemakaian

devisa (Valuta Asing). Salah satu dilakukannya hal tersebut untuk melindungi buatan dalam negeri serta melindungi kebutuhan masyarakat.⁵⁹ Kegiatan yang berhubungan dengan ekspor dan impor juga telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dalam konteks ini bahwa di Indonesia tidak semua barang yang diimpor bisa masuk ke wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu barang impor akan dilakukan pemeriksaan pabean serta pemeriksaan fisik terhadap barang tersebut.

Adapun barang impor harus dibawa ke kantor pabean tujuan pertama untuk ditetapkan dan kedatangan tersebut wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.⁶⁰ Kegiatan impor memiliki dua macam yaitu impor untuk dipakai terdapat pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pada Bab II di paragraf 2 pasal 10B ayat 1 yang berbunyi:

(1) Impor untuk dipakai adalah:

- a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
- b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

⁵⁹ Purba Radins. 1984, *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta. Pustaka Dian. Hlm 170-171

⁶⁰ Pasal 7A Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Impor sementara terdapat pada Bab II di paragraf 3 pasal 10D yang berbunyi:

- 1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- 2) Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 3) Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.
- 4) Barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk, setiap bulan dikenai bea masuk paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- 5) Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- 6) Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pada paragraf ketiga pasal 10D dijelaskan bahwa barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk impor kembali dan barang impor sementara sampai saat diekspor kembali tetap berada dalam pengawasan pabean.

Agar bisa melakukan impor barang haruslah menjadi importir terlebih dahulu dimana untuk menjadi importir ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guna kelancaran perdagangan.⁶¹

- a. Harus merupakan badan hukum (PT, CV, FA, PN, dan PERUM)
- b. Importir harus memiliki Angka Pengenal Importir Sementara (APIS) atau Angka Pengenal Importir (API) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)

61 Adrian Sutedi., 2014, *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta. Niaga Swadaya. Hlm 37

Dalam impor untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Sementara (APIS), perusahaan harus mengajukan permohonan dengan mengisi daftar isian permohonan pada kantor wilayah departemen perdagangan persyaratan:⁶²

- a. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan besar dan menengah.
- b. Memiliki kemampuan dan keahlian yang lazim diperlukan untuk melaksanakan impor.
- c. Memiliki referensi bank devisa.

Persyaratan yang harus dimiliki APIS untuk seterusnya ingin memperoleh API adalah:

- a. Telah melakukan impor sekurang-kurangnya 4 kali dan telah mencapai nilai \$ 100.000.
- b. Tidak pernah membatalkan atau ingkar kontrak impor kecuali karena keadaan memaksa diluar kemampuan.

Persyaratan-persyaratan tersebut harusnya dipenuhi oleh seorang importir agar dapat lebih terarah dan efisien sehingga komoditi yang diimpor benar-benar dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun dalam pembayaran impor disesuaikan dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dimana pada tanggal 21 juli Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor.⁶³ Adapun pembayaran impor dapat dilakukan dengan *Letter Of Credit* atau cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam perdagangan luar negeri

62 Shanti Rachmadsyah, S.H. *Prosedur Angka Pegenal Importir*.
www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 23 mei 2018

baik tunai maupun kredit. Sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Lazimnya pembayaran impor dapat dilakukan sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Dengan *Letter of Credit* dimana realisasi impor dan pembayarannya disalurkan melalui bank menurut prosedur perbankan.
- 2) Dengan tunai berarti harga komoditi dibayar tunai. Seterusnya komoditi itu diterima dari *supplier*. Dalam kategori pembayaran tunai dapat dimasukkan pembayaran dimuka karena dalam cara pembayaran dimuka harga komoditi dibayar lebih dulu, baru komoditi diterima dari *supplier*. Yang membedakannya hanyalah waktu pembayaran saja dimana pembayaran *supplier* diluar negeri dilakukan dengan mentransfer valuta melalui bank atau melalui pos, atau jika importir mempunyai valuta di bank luar negeri, pembayaran dapat dilakukan melalui bank tersebut.
- 3) Dengan pembayaran kemudian atau disebut juga dengan *Open Account*, dimana komoditi diterima dari *supplier* lebih dahulu, lalu baru dibayar tarif harga kepada *supplier* dengan melakukan transfer valuta atau melalui bank diluar negeri jika importir memiliki valuta pada bank tersebut.
- 4) Dengan konsinyasi atau *consignment*, harga komoditi baru dibayar oleh importir setelah komoditi yang dikirim oleh *supplier* terjual, dimana pembayarannya dilakukan dengan mentransfer valuta kepada *supplier* melalui bank atau pos. Namun perlu diketahui, sebenarnya importir tidak berfungsi sebagai pembeli dalam prosedur konsinyasi tetapi diminta oleh

63 Anonim. *Pemerintah Tetapkan Aturan Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor*. <http://setkab.go.id>. Diakses pada tanggal 8 April 2018.

64 Anonim. *Pembayaran Transaksi Ekspor dan Impor*. <https://w3cargo.com>. Diakses pada tanggal 8 April 2018.

supplier menjual komoditi yang dikirimnya. Jika terjual, barulah importir tersebut melakukan pembayaran kepada *supplier* (sebesar harga penjualan dikurangi komisi dan biaya-biaya penjualan yang telah dilakukan importir untuk komoditi yang terjual tersebut).⁶⁵

3. Ketentuan Impor Produk Berbahan Tekstil

Produk tekstil adalah hasil pengolahan lebih lanjut dari tekstil, baik dari setengah jadi maupun yang sudah jadi dimana jenis yang dimaksud produk tekstil adalah:⁶⁶

- a. Pakaian jadi adalah berbagai jenis pakaian yang siap pakai dalam berbagai ukuran untuk digunakan pada laki-laki dan perempuan maupun untuk anak-anak atau sebagai pelindung dan seragam.
- b. Tekstil rumah tangga antara lain seperti kain pengelap, celemek, sarung tangan dan lain-lain.
- c. Kebutuhan industri antara lain seperti canvas, saringan, tekstil rumah sakit maupun keperluan angkatan perang.

Pada umumnya semua barang dapat diimpor, kecuali barang dibatasi impor, barang dilarang impor, atau ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.⁶⁷

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Anonim. *ketika keresahan industri TPT Indonesia berubah menjadi pencerahan*. <https://egismy.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 26 mei 2018.

⁶⁷ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/ M-DAG/PER/7 /2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Barang impor dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu: barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor.⁶⁸

Produk tekstil dikategorikan sebagai produk tertentu dimana di jelaskan pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor /87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu bahwa “Produk tertentu adalah produk yang dibatasi impornya berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan pembekalan kesehatan rumah tangga, pakaian jadi dan barang tekstil sudah jadi lainnya, alas kaki, elektronik, dan mainan anak-anak.” Dibatasi impor pada produk tekstil mengharuskan dilakukannya mekanisme perizinan impor yaitu:⁶⁹

- a. Pengakuan sebagai importir produsen;
- b. penetapan sebagai Importir terdaftar;
- c. persetujuan Impor;
- d. laporan surveyor; dan/ atau
- e. mekanisme perizinan Impor lain.

Produk tekstil dikategorikan sebagai produk tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik angka pengenal importir umum (API-U).⁷⁰

Adapun perusahaan pemilik API-U haruslah melakukan persyaratan awal

68 Op.cit., Pasal 4 ayat (1)

69 Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/ M-DAG/PER/7 /2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

70 Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor /87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

sebagaimana diatur pada pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor / 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, bahwa:

Pasal 10

- 1) Perusahaan pemilik API-U yang mengimpor Produk Tertentu wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan impor Produk tertentu, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan melampirkan scan Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah di paraf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan tembusan kepada instansi terkait.

Larangan untuk mengimpor produk tertentu ditujukan kepada perusahaan pemilik angka pengenal importir umum (API-U) jika melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor /87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, bahwa:

Pasal 13

API-U yang dimiliki oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dicabut apabila perusahaan:

- a) Mengimpor produk tertentu tidak sesuai dengan pelabuhan tujuan impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- b) Melanggar ketentuan larangan mengeluarkan produk tertentu yang diimpornya dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- c) Mengimpor produk tertentu tidak dilengkapi dengan LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/ atau
- d) Tidak melaksanakan kewajiban penyampaian dalam pasal 10 dalam waktu 2 (dua) bulan sejak API dibekukan.

Pada produk pakaian jadi berupa barang kiriman paling banyak 10 *pieces*, dan atau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut bernilai

paling banyak FOB US\$ 1.000,00 perorang menggunakan pesawat udara,⁷¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor /87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu tidak diberlakukan.⁷²

Suatu barang yang dapat diimpor dan tidak dapat diimpor untuk mengetahuinya haruslah melihat ketentuan khusus yang mengatur barang tersebut seperti pada produk yang berbahan tekstil yaitu salah satunya larangan untuk mengimpor pakaian bekas.⁷³ Barang yang dilarang untuk diimpor dimaksudkan untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri yaitu dalam rangka untuk menjaga kepentingan nasional dari pengaruh buruk yang ditimbulkan.⁷⁴

F. Ketentuan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor

Kegiatan ekspor dan impor sejatinya telah diatur dalam perundang-undangan, namun dengan berjalannya waktu pada perkembangan masyarakat membuat perundang-undangan hingga sampai saat ini ada yang masi berlaku dan ada yang sudah tidak berlaku atau mengalami perubahan. Pakain bekas

71 BcKualanamu. *Impor Produk Tertentu*. <http://bckualanamu.beacukai.go.id>. Diakses pada tanggal 27 mei 2018.

72 Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor /87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

73 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

74 Anonim. *Pengelolaan Jenis Barang Ekspor-Impor*. <https://lingkupmanajemen.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 26 mei 2018.

dilarang untuk di impor kedalam wilayah Negara Republik Indonesia. Secara legal pengaturan pakaian bekas impor diatur oleh pemerintah dalam beberapa pengaturan perundang-undangnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, namun perlu diketahui bahwa dalam kebijakan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan pastilah memiliki payung hukum tertinggi.

Pada ketentuan Larangan Impor Pakaian Bekas payung hukum tertinggi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dimana disebutkan bahwa pada pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru”. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa “Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru”, dapat disimpulkan bahwa konteks “dalam hal tertentu” pada ayat tersebut adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta

Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷⁵.

Selain itu ada juga Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dalam perubahannya Isi dalam Undang-Undang tersebut tidaklah mengalami perubahan secara utuh pada Undang-Undang sebelumnya. Hanya saja dilakukannya penambahan isi materi dan beberapa pasal yang dihapus dalam Undang-Undang, dilakukannya hal tersebut karena seiring dengan berjalanya waktu serta munculnya tuntutan-tuntutan pada masyarakat yang mengharuskan dilakukannya perubahan. Berkaitannya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor bahwa Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan mengatur segala aspek mengenai pengawasan atau lintas masuk dan keluarnya barang di wilayah Negara Republik Indonesia, selain itu juga menjelaskan prosedur dan tata cara kegiatan ekspor dan impor serta larangan atau bagaimana sanksi dan denda terhadap yang melakukan pelanggaran tindak pidana dalam kegiatan ekspor dan impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Isi dalam Peraturan Menteri tersebut tidak hanya melarang untuk mengimpor pakaian bekas, melainkan juga untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli dikarenakan berbahaya

⁷⁵ Anonim. *Penjelasan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*. <https://hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 6 mei 2018.

bagi kesehatan. Menurut penelitian laboratorium yang dilakukan Kementerian Perdagangan, penyakit yang ditimbulkan mulai dari penyakit kulit hingga HIV sehingga Berpotensi membahayakan.⁷⁶



⁷⁶ Anonim. *Berita ekonomi bisnis*. <https://finance.detik.com>. Diakses pada tanggal 6 mei 2018.